



# Prosedur Pelayanan Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Teratai Jember

Audy Yosi Meyla<sup>1</sup>, Desy Puspita Arum<sup>2</sup>, Devi Hardianti Rukmana<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Akuntansi Syariah, Univeritas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

<sup>1\*</sup> [audyyosimeyla@email.com](mailto:audyyosimeyla@email.com), <sup>2</sup> [desypuspitaarum21@email.com](mailto:desypuspitaarum21@email.com), <sup>3</sup> [devihardianti@uinkhas.ac.id](mailto:devihardianti@uinkhas.ac.id)

Info Artikel	Abstrak
<b>Masuk:</b> 15 Februari 2024	Laporan hasil Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) atau juga bisa disebut magang ini berjudul " prosedur pelayanan kendaraan bermotor pada kantor bersama Samsat teratai Jember" laporan ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui apa-apa saja prosedur pada saat melakukan pembayaran pajak tahunan atau memperpanjang STNK dan juga mengganti plat motor ataupun mobil di kantor Samsat kota Jember. Adapun prosedur dan cara untuk memperpanjang STNK atau membayar pajak tahunan dapat dilakukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak Samsat membawa STNK asli dan untuk mengganti plat motor ataupun mobil bisa membawa BPKB asli. Dan bagi masyarakat yang ingin mengganti plat motor atau mobilnya harus menyertakan formulir hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan dan kendala yang terjadi pada saat pergantian STNK ataupun plat motor dan mobil. Adapun masyarakat yang kehilangan STNK harus melakukan BBN atau bea balik nama dan mutasi. Dalam penyusunan jurnal ini penulis menggunakan metode kualitatif.
<b>Diterima:</b> 20 Februari 2024	
<b>Diterbitkan:</b> 24 Februari 2024	
<b>Kata Kunci:</b> Prosedur pelayanan, Perpanjangan, Pergantian STNK	

## PENDAHULUAN

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelayanan publik memiliki peran yang sangat penting di dalamnya. Apabila pelayanan publik dilakukan dengan baik maka masyarakat akan sejahtera.

Pada saat ini banyak sekali teknologi yang tercipta untuk memperbaiki kualitas masyarakat dan mempermudah kehidupan masyarakat karena itu masyarakat semakin mudah untuk mengumpulkan, mengelola dan mengerti berbagai informasi pengetahuan maupun kebijakan beserta dapat tersebar luas Kepada seluruh wajib pajak yang memerlukan pelayanan. Bisa dinyatakan efektif jika masyarakat yang memerlukan pelayanan memperoleh kemudahan pada bentuk pelayanan yang disajikan sehingga akan lebih hemat, cepat, murah, produktif dan responsif.

Salah satu dari pencapaian yang diinginkan oleh suatu organisasi adalah efektivitas agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan oleh masyarakat. Tingkat efektivitas ini bisa dilihat dengan cara melakukan perbandingan antara rencana dengan target yang telah ditentukan dan didapat dari hasil yang telah dicapai, dan apabila suatu pekerjaan tidak sesuai dengan rencana maka kegiatan yang dilakukan tersebut tidak efektif.

Tercatat pada undang-undang nomor 28 tahun 2007 yang menuliskan dan berisi ketentuan umum dan tata cara pajak ataupun perpajakan ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang berisikan di undang-undang, dengan tidak mendapatkannya imbalan secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara dan juga untuk menyejahterakan dan memakmurkan kehidupan masyarakat

Pemerintah dapat menyelenggarakan atau mengadakan program-program pembangunan nasional untuk memenuhi keperluan masyarakat dengan membiayai fasilitas publik seperti pembangunan jembatan, jalan, rumah sakit, sekolah, halte bus, dan juga infrastruktur lainnya oleh dana yang bersumber dari pembayaran pajak.

## METODE

Metode ialah suatu cara guna mendapatkan sebuah data dan juga yang mengelompokkan bagaimana sebuah data tersebut bisa didapatkan, mengidentifikasi suatu variabel kemudian menjabarkannya menjadi sub variable. Pada saat kegiatan pencatatan data atau menyatukan keterangan yang mungkin diperlukan.

Analisis yang dipakai oleh sang penulis pada penelitian kali ini menggunakan metode kualitatif, adapun metode pelaksanaannya yaitu sebagai berikut:

Metode merupakan cara untuk memperoleh atau mendapatkan data dan juga menentukan Bagaimana data tersebut didapat, menjabarkan menjadi sub variabel dan juga mengidentifikasi variabel. Pada pelaksanaan pengambilan data dan pengumpulan maupun keterangan yang diperlukan untuk penelitian ini penulis menggunakan:

- a. Pengamatan  
Penulis terjun langsung untuk melakukan observasi di kantor Samsat Jember yang dilakukan dengan cara mengamati para pegawai yang sedang bertugas.
- b. Wawancara  
Kemudian penulis melakukan wawancara yang mana metode ini dilakukan dengan cara memungut data dengan melakukan tanya jawab kepada pembimbing maupun pihak yang terkait di dalam kegiatan praktik pengalaman lapangan ini dan menanyakan yang sehubungan dengan pembayaran pajak dan juga pelayanan pajak di kantor Samsat kota Jember
- c. Metode Praktik Lapangan  
Melakukan secara langsung kegiatan di Kantor Bersama Samsat Teratai Jember dari membantu masyarakat dalam proses memperpanjang stnk sampai mencetak notice pajak.
- d. Metode Dokumentasi  
Selama proses praktik dilapangan, penulis melakukan pengambilan foto dan video dengan menggunakan kamera handphone untuk dijadikan bukti yang memperkuat isi laporan serta jurnal yang dibuat, dan sebagai jejak dokumentasi selama proses praktik lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pajak

Pajak merupakan salah satu keharusan untuk masyarakat yang terutang kepada seseorang ataupun badan yang sifatnya memaksa dan yang tercantum pada undang-undang guna keperluan negara untuk memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat. Menurut para ahli pajak, pajak merupakan biaya masyarakat dinegara yang sifatnya dipaksa kepada terutang oleh wajib pajak dan harus membayar biaya tersebut sesuai dengan peraturan yang sudah tertulis pada undang-undang dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan memiliki kegunaan untuk membayar tagihan umum sehubungan dengan keperluan negara untuk membangun suatu pemerintahan.

Berdasarkan yang tertulis pada undang-undang nomor 17 pada tahun 1997 mengenai pajak di suatu daerah yang mana telah dijelaskan bahwasanya pajak untuk kendaraan bermotor ialah Pajak yang diwajibkan atas kepemilikan atau suatu kekuasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk dari kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor alat berat dan alat berat yang tidak digunakan sebagai alat angkut orang atau barang di jalanan umum.

Kemudian yang dimaksudkan kendaraan bermotor pada uraian di atas ialah kendaraan bermotor yang dipakai dan diperuntukkan di jalan umum guna untuk membawa barang ataupun orang sebagaimana yang dalam lalu lintas. Maka dari itu seperti kereta api, pesawat, gokar, hand traktor pertanian, bulldoser kendaraan alat permanen hasil pertanian, Terdapat beberapa fungsi pajak yaitu:

- a. Sebagai pengatur bagaimana pajak berjalan dan juga melaksanakan kebijakan yang ada pada pemerintahan pada bidang ekonomi juga sebagai pengawas sosial dan untuk menggapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan.
- b. Menjadi salah satu sumber penghasilan negara dan membayar pengeluaran atau kebutuhan negara.

### 2. Urgensi perpanjangan STNK

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merupakan suatu dokumen penting yang wajib untuk para masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor. STNK bukan hanya digunakan sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan, tetapi juga memiliki beberapa fungsi penting lainnya, antara lain:

- a. Bukti Sah Kepemilikan Kendaraan  
STNK menjadi bukti sah kepemilikan kendaraan bermotor di hadapan hukum. Hal ini penting untuk menghindari berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan kendaraan, seperti penipuan atau pencurian.
- b. Sarana Identifikasi Kendaraan  
STNK memuat informasi penting tentang kendaraan, seperti nomor polisi, merk, tipe, tahun pembuatan, dan nomor rangka. Informasi ini membantu pihak berwajib untuk mengidentifikasi kendaraan jika terjadi kecelakaan, kehilangan, atau tindak pidana lainnya.
- c. Kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor  
STNK menjadi dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang wajib dilunasi oleh para pemilik kendaraan. Pembayaran PKB ialah salah satu dari sumber pendapatan daerah yang dipakai untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Persyaratan Berkendara di Jalan Raya  
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib membawa STNK saat berkendara di jalan raya. Hal ini untuk memastikan bahwa kendaraan yang digunakan sah dan laik jalan.
- e. Fungsi dan Manfaat STNK:

Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor: STNK merupakan dokumen sah yang diakui oleh negara sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Identitas Kendaraan: STNK memuat informasi penting tentang kendaraan bermotor, seperti nomor rangka, nomor mesin, dan warna kendaraan.

Kewajiban Pajak: STNK menjadi bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor yang sah.

Perlindungan Hukum: STNK dapat membantu pemilik kendaraan dalam proses hukum jika terjadi kehilangan atau kecelakaan.

Persyaratan Pengurusan Surat Lainnya: STNK diperlukan dalam pengurusan surat-surat kendaraan lainnya, seperti BPKB dan balik nama kendaraan.

### 3. Urgensi STNK bagi Pengguna Kendaraan:

- a. Mencegah Penilangan: Pengendara yang tidak memiliki STNK dapat ditilang oleh pihak kepolisian.
- b. Mencegah Penyitaan Kendaraan: Kendaraan yang tidak memiliki STNK dapat disita oleh pihak kepolisian.
- c. Melindungi Diri dari Kejahatan: STNK dapat membantu pemilik kendaraan dalam proses hukum jika terjadi kehilangan atau kecelakaan.
- d. Memudahkan Proses Perpanjang STNK: Memiliki STNK yang asli dan masih berlaku akan memudahkan proses perpanjang STNK.

### 4. Urgensi STNK bagi Negara:

- a. Sumber Pendapatan Negara: Pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan melalui STNK merupakan sumber pendapatan negara yang penting.
- b. Pendataan Kendaraan Bermotor: STNK membantu pemerintah dalam mendata jumlah dan jenis kendaraan bermotor yang ada di Indonesia.
- c. Penerapan Kebijakan Transportasi: STNK membantu pemerintah dalam menerapkan kebijakan transportasi, seperti ganjil-genap dan aturan emisi gas buang.

### 5. Prosedur Perpanjangan STNK

Menurut adios tahun 2004 mengutarakan bahwasannya prosedur merupakan bagian dari sistem yang isinya berupa kerangka dari suatu perbuatan dan menyangkut lebih dari satu orang di dalam satu atau beberapa bagian yang telah ditetapkan untuk menjamin Agar suatu kegiatan usaha ataupun transaksi yang dapat terjadi secara terus menerus .

Menurut Cole tahun 2003 menyatakan bahwasanya prosedur ialah Suatu runtutan dari pekerjaan yang melibatkan lebih dari satu orang dalam suatu kegiatan yang ditata agar menjamin adanya perbuatan yang sama pada transaksi perusahaan yang sering.

Kemudian menurut Mulyadi pada tahun 2008 prosedur ialah Suatu runtutan aktivitas yang berisikan tulis-menulis, menghitung dan juga melakukan perbandingan antara data dari sumber dengan data pendukung oleh kedua belah pihak. Dan biasanya kegiatan ini melibatkan beberapa orang di dalam suatu departemen yang dibuat guna menjamin penanganan secara sama oleh transaksi perusahaan yang terjadi berulang.

Maka dapat disimpulkan dari berbagai pandangan para ahli di atas prosedur memiliki arti ialah Suatu runtutanp aktivitas yang harus melibatkan beberapa orang dalam suatu Departemen atau lebih dari satu orang yang dilaksanakan secara berulang dengan cara yang sama.

Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Motor Tahunan (PU)

- a. Bisa langsung datang ke Samsat

Kemudian yang dilakukan pertama yaitu datang ke Samsat dengan mempersiapkan berkas persyaratan yang sudah disiapkan oleh wajib pajak yaitu KTP dan juga STNK.

- b. Menuju loket 1 atau Pelayanan Informasi

Jika wajib pajak telah memenuhi semua persyaratan dan melengkapinya kemudian datang langsung menuju pelayanan informasi. Kemudian persyaratan tersebut akan dicek terlebih dahulu oleh petugas yang ada di loket tersebut. Lalu wajib pajak akan diberikan formulir surat pendaftaran dan juga pendataan kendaraan bermotor. Yang wajib diisi pada kolom formulir oleh wajib pajak:

- 1) Identitas diri

Identitas diri ini harus di isi sesuai dengan KTP wajib pajak yang bersangkutan.

- 2) Identitas kendaraan

Di bagian kolom identitas kendaraan ini wajib pajak yang bersangkutan diharuskan untuk menulis dengan benar yaitu sesuai dengan yang tercantum pada STNK. Contohnya seperti nomor polisi, jenis kendaraan, Status kepemilikan, alamat dan juga jati diri

- 3) Jenis pendaftaran

Pada kolom jenis pendaftaran ini wajib pajak yang bersangkutan tidak diwajibkan untuk menulis formulir dikarenakan bagian ini akan diisikan oleh petugas yang bertugas pada loket tersebut.

- c. Loket Pendaftaran

Apabila wajib pajak atau yang bersangkutan sudah selesai menulis formulir surat pendaftaran dan sudah melakukan pendataan kendaraan wajib pajak yang bersangkutan memberikan formulir ke loket pendaftaran kemudian petugas loket pendaftaran akan meneliti persyaratan wajib pajak seperti :

- 1) Kartu Tanda Penduduk . harus asli ( tidak boleh foto copy)
  - 2) Apabila pembayaran dilakukan Bukan Dengan orangnya atau diwakilkan harus menyerahkan KTP asli yang sesuai dengan nama yang ada pada STNK wajib pajak atau yang bersangkutan dan membawa surat kuasa bermaterai.
  - 3) STNK harus asli ( tidak boleh foto copy)
  - 4) Untuk membuka blokir dalam STNK yang berada dalam status blokir wajib pajak diwajibkan untuk melengkapi semua persyaratan tersebut maka tugas loket akan memberikan nomor antrian kepada wajib pajak dan dipersilakan untuk menunggu.
- d. Loket Pembayaran
- Pada loket pembayaran masyarakat yang sudah mengantri akan dipanggil sesuai dengan nomor antrian oleh petugas yang berada di loket pembayaran ini.
- Pada loket ini wajib pajak atau orang yang bersangkutan akan dipanggil berdasarkan nomor urut antrian oleh petugas yang berada di loket pendaftaran sesuai dengan notice pajak yang tercetak. Pembayaran pajak kendaraan motor dapat melakukan transaksi pada bank dan kemudian wajib pajak akan diberikan slip bukti setoran dan distempel lunas.
- e. Loket Penyerahan
- Pada loket ini wajib pajak akan menunggu pengambilan sesuai dengan nomor antrian yang sudah diberikan pada saat berada di loket pendaftaran. Telah dipanggil dan menyerahkan nota pelunasan biaya kepada petugas loket penyerahan. Petugas loket akan memvalidasi notice pajak dan akan menyetempel notice pajak yang baru.

## 6. Prosedur STNK 5 Tahun

- a. Memenuhi persyaratan untuk melengkapi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor
  - 1) Bagi wajib pajak : Tanda jati diri yang sah, dan jika apabila seseorang yang bersangkutan berhalangan hadir harus menyertakan surat kuasa yang bermaterai.
  - 2) Bagi bahan hukum: salinan akta pendirian, Kemudian harus menyertakan surat kuasa yang bermaterai dan juga ditandatangani oleh pimpinan serta harus berisikan stempel badan hukum yang bersangkutan.
- b. STNK harus asli dan apabila tidak dapat menyertakan STNK asli harus menyertakan keterangan STNK hilang atau kehilangan STNK dari Kapolsek, Satlantas, radio dan juga koran.
  - a. BPKB harus asli.
  - b. Bukti bahwa sudah melakukan pembayaran secara lunas PKB/BBNKB dan SWDKLLJ dengan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) yang telah divalidasi tahun terakhir.
- c. Bukti dari hasil cek fisik kendaraan  
Pada waktu cek fisik harus dilakukan dengan cara mematuhi syarat kendaraan dan menulis formulir cek fisik kemudian para petugas Cek fisik akan mengerjakan pemeriksaan pada kendaraan bermotor tersebut seperti mengecek nomor mesin, nomor rangka, isi silinder, warna, bahan bakar dan juga warna TNKB

## 7. kendala yang terjadi pada saat perpanjangan, pergantian STNK dan plat pada Kantor Bersama Samsat Teratai Jember

Biasanya terdapat kendala pada waktu perpanjang ataupun pergantian STNK dan plat wajib pajak seperti:

- a. STNK hilang  
Pada saat memperpanjang atau membayar pajak tahunan harus menunjukkan STNK asli apabila wajib pajak kehilangan STNK maka harus mengajukan surat kehilangan supaya dapat memperpanjang STNK dan juga mengganti plat nomornya. Berikut adalah beberapa persyaratan untuk mengurus STNK hilang :
  - 1) Menyertakan foto copy KTP
  - 2) Surat pernyataan kehilangan
  - 3) Surat laporan dari kapolsek
  - 4) Surat terbit dari koran 3kali berturut-turut, disertai bukti bayar
  - 5) Cek fisik kendaran
  - 6) Menyertakan foto copy BPKBApabila telah selesai mengurus STNK hilang dan wajib pajak sudah memiliki STNK tersebut maka selanjutnya melakukan perpanjangan STNK atau mengganti plat nomor kendaraannya.
- b. BBN (Bea Balik Nama)  
Sama halnya dengan BBN, BBN merupakan pajak atas pemberian hak milik kendaraan bermotor sebagaimana hasil dari perjanjian 2 belah pihak atau perbuatan sepihak dalam keadaan jual beli atau tukar menukar hibah dapat juga sebagai bentuk warisan ataupun pemasukan kendaraan baru. Dan jika pada STNK tersebut tertulis nama yang tidak sesuai dengan wajib pajak yang memiliki STNK maka disarankan untuk mengganti nama yang tertera pada STNK tersebut dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) STNK harus asli
- 2) BPKB (Buku pemilik kendaraan bermotor)
- 3) Surat jual beli bermaterai
- 4) Mobil maupun motor harus di cek fisik terlebih dahulu
- 5) Fiskal atau disebut juga Cabut berkas

Apabila nama yang tertulis pada STNK telah sesuai maka wajib pajak dapat memperpanjang atau mengganti STNK dan Platnya nomor kendaraannya.

c. Mutasi

Mutasi termasuk juga sebagai hambatan yang terdapat pada saat memperpanjang atau mengganti STNK dan plat nomor. Mutasi ialah suatu hal yang sudah biasa terjadi, selain fisik kendaraan dan juga perpindahan lokasi pembayaran pajak kendaraan namun dalam negara kesatuan Republik Indonesia baik Kabupaten maupun provinsi. Dikarenakan jika STNK tersebut tidak sesuai dengan lokasi dengan tempat pembayaran pajak kendaraan maka tidak dapat dilakukannya perpanjangan STNK dan juga ganti plat nomor. Berikut hal-hal yang harus dilakukan wajib pajak untuk melakukan mutasi kendaraannya adalah harus memenuhi syarat di bawah ini:

- 1) Kartu Tanda Penduduk asli
- 2) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor asli
- 3) Surat Tanda Nomor Kendaraan Asli

Terdapat dua proses pada saat mutasi yaitu mutasi satu daerah dan mutasi daerah lain apabila proses mutasi mengaitkan dua daerah Samsat ataupun provinsi yang berbeda dibutuhkan cabut berkas yang menyangkutkan Polda setempat. Apabila mutasi telah dilakukan dan lokasi sudah benar pada STNK maka wajib pajak dapat melakukan perpanjangan STNK dan mengganti plat nomornya.

## KESIMPULAN

Laporan ini menjelaskan prosedur pelayanan kendaraan bermotor di Samsat Jember. Pembayaran pajak tahunan/perpanjang STNK dan penggantian plat motor/mobil memiliki prosedur yang berbeda. Kendala yang dihadapi adalah proses BBN dan mutasi untuk kehilangan STNK dan kendala lain yang tidak disebutkan. Laporan ini menggunakan metode kualitatif.

Pelayanan publik berperan penting dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Teknologi dan e-government dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pajak juga memiliki arti sebagai sumber pendapatan negara yang penting untuk membiayai program-program pembangunan nasional.

Berikut penjelasannya:

Pelayanan publik: Pelayanan publik yang efektif dan efisien penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat akan lebih sejahtera jika pelayanan publik dilakukan dengan baik.

Teknologi dan e-government: Teknologi dan e-government dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Teknologi memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dan layanan publik dengan mudah dan cepat. E-government dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Pajak juga bertujuan sebagai sumber pendapatan negara yang penting untuk membiayai program-program pembangunan nasional. Pembangunan infrastruktur seperti rumah sakit, jembatan, sekolah, jalan dan halte bus dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih penulis ucapkan kepada pihak Samsat Teratai Jember atas waktu, pengalaman, pembelajaran yang telah diberikan kepada penulis dan berkenan menerima penulis untuk melakukan praktik kerja lapangan (PPL) di Kantor Bersama Samsat Teratai Jember.

Terimakasih untuk dosen pamong yang ada ditempat PPL yang sudah memberikan bimbingan dan juga arahan kepada penulis selama PPL berlangsung.

Teimakasih kepada DPL penulis yang telah membantu dan mengarahkan untuk pembuatan jurnal ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Roy, I. (2018). Prosedur Administrasi Penjualan Pada Usaha Jaya Teknika Jakarta Barat. *Perspektif: Jurnal Ekonomi dan Manajemen Akademi Bina Sarana Informatika*, 16(1), 26-30.
- Nur, W, N. (2017). Perencanaan pembelajaran: pengertian, tujuan dan prosedur. *Ittihad: Jurnal Pendidikan*, 1(2), 185-195.
- Nasution, F. R., & Sinaga, R. S. (2014). Evaluasi Kinerja Pegawai Kantor Samsat dalam Pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 2(1), 1-17.
- Sutedi, A. *Hukum Pajak*, (Jakarta : Sinar Grafika,2011), hal.2

- Thoharudin, M., Suriyanti, Y., & Huda, F. A. (2019). Pengaruh prosedur pembiayaan terhadap keputusan pengambilan pembiayaan pada BPD Kalimantan Barat KCP syariah cabang Sintang. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI)*, 4(1), 1-10.
- DADAN, F. H. (2021). MEKANISME KAPAL TUNDA UNTUK MEMBANTU PANDU DI ALUR PELAYARAN CILACAP. KARYA TULIS.